

HIDUP MENGGEREJA DARI BAWAH DAN KONSEP PERCAYA

(Sebuah Tinjauan Singkat pada Persoalan Pemberdayaan Jemaat)

Handi Hadiwitanto²

Abstract

The community empowerment is one of the important church responsibilities. There are various empowerment programs that can be done by the congregations. In this article I narrow down the concept of community empowerment in its relationship to the concept of ecclesiology and church participation. The community empowerment can be affected either positively or negatively by a variety of variables, both relates to the church itself and other variables. This article attempts to show that the two issues could be considered as variables that could affect the concept of community empowerment, namely the concept of church from below and the concept of trust. We expect that the result of this discussion can become a kind of preliminary observation on the issues of community empowerment within churches.

Kata kunci: pemberdayaan jemaat, menggereja dari bawah, eklesiologi, percaya (*trust*).

1. Pendahuluan

Beberapa waktu yang lalu saya diminta untuk berbicara dalam suatu persidangan gerejawi mengenai topik pemberdayaan jemaat. Melalui percakapan singkat sebelumnya saya menangkap kesan ada semacam kesadaran yang mulai muncul bahwa pemberdayaan jemaat itu adalah hal yang penting. Gereja mulai melihat bahwa ada banyak potensi dan kemampuan dari anggota jemaat yang jika digali serta dikenali dengan serius dapat mendukung kehidupan bergereja tersebut.³ Berkaitan dengan hal ini saya teringat pada Christian Schwarz (1996: 68-9) penulis buku *Pertumbuhan Gereja yang Alamiiah*. Ia mengatakan bahwa salah satu unsur alamiah gereja yang perlu diperhatikan adalah unsur pelipatgandaan. Pelipatgandaan ini dapat dimengerti sebagai berikut: seorang pemimpin gereja yang berbuah adalah bukan menghasilkan pengikut tetapi yang menghasilkan pemimpin-pemimpin baru. Seorang penginjil yang berbuah bukan sekedar menghadirkan petobat baru tetapi juga penginjil baru. Dan dengan demikian maka gereja sebagai organisme dan juga organisasi dapat terus berkembang dengan baik. Menurut saya, apa yang dikatakan oleh Schwarz adalah hal menarik dan memiliki konsekuensi yang kuat, bahwa salah satu tanggungjawab gereja yang menjalankan fungsinya adalah memberdayakan anggota-anggotanya untuk sungguh-sungguh (kembali) menjadi gereja yang mandiri, kritis dan dewasa dalam praksisnya.⁴ Gereja tidak dimengerti sekedar mengumpulkan pengikut dan anggota-anggota yang memenuhi catatan administratif. Gereja adalah orang-orang yang terus berkumpul dan kemudian diberdayakan untuk mengerti dengan baik siapa mereka dan apa yang hendak mereka lakukan,

khususnya dalam memperjuangkan gerakan Kristus dalam konteks kemanusiaan dan kehidupan di dunia ini (gereja yang berteologi; lih. Pieris 1996: 36; Cobb 1997). Di sini kita dapat pahami bahwa gereja yang tidak memberdayakan anggota-anggota jemaatnya untuk menjadi gereja yang mandiri, kritis dan dewasa dalam praksis adalah gereja yang tidak alami dan berarti kurang baik.

Nah, jika kesadaran sudah muncul dan program-program pemberdayaan mulai disiapkan, lalu mengapa pemberdayaan jemaat ternyata masih perlu dibicarakan? Saya tidak berasumsi dapat menjawab pertanyaan ini dengan amat memuaskan dalam karangan dan kesempatan yang amat pendek. Saya hanya ingin memperlihatkan pengamatan awal saya bahwa kesadaran tentang pemberdayaan tidak berarti konsep mengenai pemberdayaan jemaat itu sudah menjadi jelas dengan sendirinya. Ketika saya melihat catatan mengenai pemberdayaan jemaat dalam dokumen persidangan gerejawi yang mengundang saya tersebut, terlihat secara umum gereja masih berbicara mengenai pemberdayaan para pejabat gerejawi dan aktivis saja. Padahal ketika hal pemberdayaan itu ditanyakan kepada anggota jemaat, jawabannya rata-rata merujuk pada perlunya perhatian dan pengenalan seluruh potensi dari anggota-anggota jemaat yang selama ini belum dilihat oleh gereja. Jika kita cukup serius dengan perbedaan keduanya, kita sebenarnya melihat persoalan bagaimana konsep (teologis) mengenai gereja itu sendiri dapat berpengaruh pada konsep dan sikap mengenai pemberdayaan jemaat, misalnya pemberdayaan untuk kelompok tertentu saja atau pemberdayaan untuk seluruh anggota jemaat? Sebagai contoh sederhana, ketika pemahaman tentang gambar gereja ternyata diketahui bersifat amat maskulin dan dikendalikan oleh kaum laki-laki (biasanya dipengaruhi oleh konsep budaya/tradisi tertentu), maka konsekuensinya jelas kaum perempuan tidak akan pernah mendapatkan tempat, baik dalam peran maupun dalam pemikirannya. Dalam kondisi seperti ini, pemberdayaan yang sudah berjalan dapat kita pertanyakan, sedangkan pemberdayaan pada kaum perempuan secara otomatis akan menemukan halangan-halangan. Contoh lainnya, jika gereja merepresentasikan dirinya dengan gaya kepemimpinan yang *top-down* dan sangat hirarkis, atau yang lebih berpihak pada kelompok dan kepentingan elit tertentu, maka hal ini akan berpengaruh pada pemberdayaan yang hanya diarahkan pada para pejabat birokrasi gereja, sedangkan anggota jemaat bisa jadi tidak dianggap sebagai sasaran pemberdayaan.

Sampai di sini rasanya cukup jelas bahwa persoalan pemberdayaan (dan juga banyak persoalan lain dalam gereja) tidak semata-mata dapat diselesaikan begitu saja secara spontan dengan membuat program tertentu. Dalam ilmu Pembangunan Jemaat dan teologi praktis-empiris, setiap persoalan dalam gereja, termasuk persoalan pemberdayaan jemaat ini, perlu didiskusikan bersama dengan teologi mengenai gereja itu sendiri (eklesiologi) dan didukung oleh teori-teori (sosial) lainnya yang relevan. Hasil diskusi seperti ini dapat menolong kita untuk mengukur dan

memahami persoalan dengan lebih baik, seperti unsur-unsur apa saja yang mempengaruhi baik secara positif maupun negatif. Hasil dari analisis dan diskusi seperti ini pada akhirnya dapat menolong kita dalam menyusun tindakan-tindakan strategis yang dapat dipertanggungjawabkan dan tepat sasaran. Karena itu sebelum terburu-buru melompat pada tindakan membuat program pemberdayaan ini dan itu, maka melalui karangan ini saya ingin mengajak kita untuk berdiskusi dengan isu-isu yang saya asumsikan relevan untuk melihat persoalan yang dapat memberikan pengaruh pada konsep bergereja dan pemberdayaan jemaat itu sendiri. Saya sadar meskipun diskusi ini singkat tetapi paling tidak dari sini kita dapat mulai memikirkan tindakan strategis yang lebih baik atau bahkan melanjutkannya dengan penelitian yang lebih lengkap.

Dalam karangan ini saya mengangkat dua buah isu. Pertama adalah isu eklesiologi kontemporer, yaitu ‘hidup menggereja dari bawah’. Isu ini diasumsikan akan memperlihatkan salah satu tantangan kalau bukan sebuah persoalan gereja yang memiliki pengaruh pada konsep pemberdayaan jemaat seperti apa yang akan dilakukan. Kedua, selain masalah yang bersifat teologis (eklesiologis), saya juga melihat isu lain, yaitu konsep sosial mengenai *trust* atau rasa percaya yang juga diasumsikan dapat mempengaruhi bagaimana sikap gereja pada anggotanya dan pada akhirnya juga pengertian mengenai persoalan pemberdayaan itu sendiri. Berdasarkan pembicaraan mengenai kedua isu ini kita dapat melihat relevansi keduanya dan bagaimana konsekuensinya terhadap pemberdayaan jemaat. Pada bagian akhir saya akan menuliskan kesimpulan.

2. Hidup menggereja dari bawah

Konsep ‘hidup menggereja dari bawah’ pertama kali saya baca dalam tulisan Banawiratma (1997) yang berbicara mengenai rekomendasi bagi kehidupan gereja-gereja di Indonesia. Konsep ini berangkat dari refleksi Gereja Katolik atas konsili Vatikan II mengenai gereja sebagai Umat Tuhan dan Tubuh Kristus yang seharusnya memberi perhatian besar pada anggota jemaat di aras lokal. Bersamaan dengan itu, kesadaran pada konteks sosial di mana jemaat lokal hidup, seperti persoalan marjinalisasi dan penindasan kemanusiaan karena berbagai sebab, menuntut gereja serta seluruh anggotanya untuk secara dinamis membangun refleksi dan strategi yang kontekstual dari bawah.

Dalam konteks gereja Katolik khususnya di Amerika Latin, pergumulan seperti di atas, termasuk situasi penindasan, kemiskinan, kelaparan dan marjinalisasi yang amat kuat, mendorong gereja mengembangkan konsep komunitas basis. Pembentukan komunitas basis berangkat dari pemahaman eklesiologi yang memandang keberadaan anggota-anggota jemaat biasa dengan segala

pergumulannya di aras akar rumput sebagai unsur yang sangat penting bagi gereja.⁵ Komunitas basis bukan persekutuan gereja induk yang besar dan institusional. Komunitas basis lebih kecil dari komunitas jemaat. Mereka adalah representasi dari komunitas terkecil dalam kehidupan gereja yang bersedia berkumpul untuk melakukan ibadah, studi Alkitab secara serius, mendiskusikan persoalan-persoalan kehidupan yang mereka hadapi, dan bersedia melakukan pelayanan gereja dan sosial.⁶ Seperti gereja mula-mula, dalam komunitas basis anggota jemaat biasa justru mendapat kesempatan dan didorong untuk mendialogkan konteks kehidupan mereka dengan semangat Kristus dan memperjuangkan gerakan Kristus di tengah kehidupan nyata, sehingga mereka tahu siapa dan mau apa mereka sebagai gereja dalam konteks (Boff 2003: 30-1; Nadeau 1999:158). Dalam konsep dan sikap seperti ini kita dapat merasakan semangat hidup menggereja dari bawah, di mana gereja benar-benar dihidupi oleh anggota-anggota jemaat yang berteologi dan melayani, menggereja dari komunitas manusia-manusia biasa di aras lokal dan kontekstual (Kärkkäinen 2002:176-8; Nadeau 1999:153; Banawiratma 1997; Pieris 1996). Komunitas basis adalah wujud nyata hidup menggereja dari bawah, yang menempatkan anggota jemaat dan pergumulan lokal sebagai inti dari gambar dan pelayanan gereja.

Selain komunitas basis, pemikiran eklesiologis lain yang mendukung semangat menggereja dari bawah adalah *communion ecclesiology* (eklesiologi persekutuan). Pemikiran *communion ecclesiology* ini juga dapat kita lihat dalam konsili Vatikan II. Bahkan dapat dikatakan bahwa inti dari pemikiran mengenai gereja dalam konsili Vatikan II terletak pada konsep eklesiologi mengenai persekutuan ini, yaitu memberikan penjelasan-penjelasan mengenai relasi antara gereja dengan Tuhan, Paus dan para uskup, dan juga relasi seluruh warga gereja, baik dalam satu denominasi maupun antar denominasi. *Communion ecclesiology* dalam gereja Katolik hendak memberikan kembali pemahaman mendasar mengenai struktur gereja sekaligus juga praksis gereja yang dibutuhkan oleh dunia (Doyle 1992: 140). Tetapi seperti yang juga menjadi kritik Doyle (1992: 142-3), *communion ecclesiology* dalam gereja Katolik sering disalahpahami hanya sebatas pada persoalan struktur gereja. Hirarki dalam struktur gereja Katolik memang tidak dapat begitu saja diabaikan. Karena itu sekalipun ada penghargaan yang tinggi pada lokalitas dan peran anggota jemaat seperti dalam komunitas basis, tetapi gereja tetap mempertahankan pemahaman mengenai hirarkis pemerintahan gereja serta wilayah-wilayahnya dan menempatkan anggota jemaat serta komunitas basis di bawah struktur yang sudah ada.

John Zizioulas, seorang teolog dari gereja Ortodoks, kemudian juga mempopulerkan *communion ecclesiology* tetapi dengan tekanan dan pendekatan yang berbeda. Zizioulas benar-benar membicarakan *communion ecclesiology* sebagai persekutuan jemaat lokal yang berkumpul,

bebas, dan ditahbiskan dalam baptisan. Ke-gereja-an suatu jemaat lokal tidak terletak pada hirarki, elit, universalitas atau institusi gereja tertentu, tetapi pada Kristus dan pada persekutuan manusia yang membangun relasi dengan Kristus. Pada dasarnya ini adalah gambar gereja klasik tentang tubuh Kristus, persekutuan orang yang percaya kepada Yesus. Posisi dan peran orang-orang yang ditahbiskan tidak terletak pada persoalan otoritas dan kekuasaan belaka. Karena itu orang-orang yang ditahbiskan dalam gereja tidak dimengerti sebagai kelompok yang berkuasa di gereja, melainkan kelompok yang memiliki relasi konkret dengan komunitas. Mereka adalah representasi dari komunitas lokal tersebut. Hal yang menarik adalah, anggota jemaat secara umum juga dipandang sebagai kaum yang ‘ditahbiskan’, yaitu melalui baptisan dan sidi yang telah mereka lakukan. Dengan demikian maka anggota jemaat bersama dengan mereka yang ditahbiskan sebagai pejabat gerejawi sebenarnya dimengerti sebagai persekutuan yang melebur dan merepresentasikan komunitas lokal gereja. Sebagai gereja tidak ada lagi individu atau kelompok yang bersifat superior, karena mereka semua adalah representasi persekutuan lokal di dalam Kristus. Identitas gereja hanya dapat dibicarakan ketika suatu persekutuan atau jemaat lokal dengan sungguh-sungguh melakukan tanggungjawabnya di tengah konteks (Zizioulas 1988:296-301; Kärkkäinen 2002: 95 dst.; bdk. Boff 2000: 66).

Pemikiran eklesiologis seperti ini mengandaikan bahwa anggota-anggota jemaat yang bersekutu dalam lokalitas tertentu adalah sungguh-sungguh pusat keberadaan gereja itu sendiri. Saya melihat bahwa *communion ecclesiology* yang dipikirkan oleh Zizioulas ini adalah contoh yang menarik yang mendukung semangat hidup menggereja dari bawah, melengkapi apa yang dipikirkan dalam konsep komunitas basis. Dalam konteks Indonesia, Mangunwijaya (1999; bdk. Singgih 1999: 103 dst.) sebenarnya dapat disebut sebagai teolog kontekstual Indonesia yang berbicara mengenai konsep komunitas basis tetapi dengan gaya seperti Zizioulas. Mangunwijaya menekankan keberadaan keluarga sebagai simpul berharga dari jejaring jemaat lokal, yang terlepas dari hirarki dan wilayah pemerintahan gereja. Perhatian pada keluarga dalam kehidupan bergereja seperti yang diusulkan Mangunwijaya, atau kelompok-kelompok kecil lainnya di aras lokal masyarakat dapat dipertimbangkan sebagai sebuah pemikiran eklesiologis yang mendukung upaya menggereja dari bawah yang kontekstual Indonesia. Keluarga-keluarga Kristen atau individu-individu Kristen (dan bukan elit atau institusi gereja) yang berkumpul dan bersekutu pada dasarnya adalah anggota-anggota jemaat. Mereka harus diberi tempat sentral dalam eklesiologi untuk berperan secara nyata sebagai gereja. Dan sampai sejauh ini, kita dapat memahami baik konsep komunitas basis dan *communion ecclesiology* mendukung secara nyata semangat hidup menggereja

dari bawah ini, karena lokalitas, konteks, dan peran anggota jemaat yang sama menjadi titik berangkat pelayanan gereja (Boff 2000: 67).

Jika kita sekarang mencoba melihat relevansi diskusi di atas dengan topik mengenai pemberdayaan jemaat, maka sudah seharusnya pemberdayaan menjadi sebuah konsekuensi logis. Jika seluruh anggota jemaat dalam tingkat yang paling sederhana dan mendasar diharapkan mampu membangun komunitas-komunitas yang berteologi, beribadah dan melayani, maka dibutuhkan upaya pemberdayaan bagi seluruh anggota jemaat untuk memenuhi gambar gereja dan tugas tersebut. Pemberdayaan dalam konteks hidup menggereja dari bawah adalah sebuah penguatan pada kemampuan berteologi, kemandirian dalam bersekutu dan kreativitas serta kesempatan dalam mengembangkan pelayanan bagi seluruh anggota jemaat, termasuk mereka yang justru selama ini terpinggirkan (secara institusional-tradisional, budaya, sosial). Dengan pengertian seperti ini maka pertimbangan utama dalam pemberdayaan jemaat bukan lagi pada status dan individu siapa yang perlu diberdayakan (karena pada dasarnya pemberdayaan adalah untuk semua anggota gereja) tetapi pada persoalan kontekstual apa yang harus diperhatikan dalam kehidupan anggota jemaat dan masyarakat, sehingga pemberdayaan dapat mewujudkan kehidupan menggereja dari bawah (lih. Boff 2003: 31).

Semangat hidup menggereja dari bawah dapat kita lihat sebagai sebuah perubahan besar dalam eklesiologi gereja Katolik, yang sebelumnya cenderung bersifat dari 'atas' ke 'bawah'. Tetapi menurut pendapat saya, konsep ini tidak benar-benar baru dalam sejarah gereja-gereja protestan. Gerakan reformasi gereja yang melahirkan gereja reformasi/protestan diawali oleh Martin Luther dari kesadaran, bahwa gereja itu adalah sebuah komunitas dan gerakan umat di mana setiap anggota jemaat dibebaskan dari kompleksitas birokrasi, teologi dan posisi gereja yang elitis. Setiap anggota jemaat dibebaskan untuk memiliki fungsi yang setara dalam mendialogkan Firman Tuhan dengan kehidupannya (Kärkkäinen 2002:39 dst.; Woodhead 2004: 159-160). Sekalipun kemudian dalam perkembangannya (Calvin, Zwingli dll.) kepemimpinan dan jabatan gerejawi ini dibicarakan kembali dan menemukan bentuknya yang baru, tetapi pada dasarnya semangat gereja reformasi tetap terletak pada imamat am semua orang percaya, penghargaan pada peran setiap orang dalam berteologi, termasuk otoritas dan keberadaan gereja (Woodhead 2004: 161-2). Tidak ada lagi distingsi imam dan awam, yang bagi saya amat sejalan dengan semangat menggereja dari bawah. Karena itu juga Mangunwijaya (1999) justru menggunakan keluarga dari Gereja Protestan di Maluku yang sedang melakukan ibadah keluarga sebagai contoh sikap hidup menggereja dari bawah. Pada dasarnya, gereja bagi kaum protestan dijalankan sejak awal oleh semangat dan gerak seluruh anggota jemaat, bukan dari elit gereja tertentu. Karena itu pertanyaan

yang relevan saat ini adalah, apakah hidup menggereja dari bawah seperti yang kita coba lihat di atas, yang juga adalah semangat dasar dari gereja protestan, adalah semangat yang masih ada dalam kehidupan bergereja kita?

Anehnya, menurut pengamatan saya, dalam perkembangan organisasi dan institusi gereja protestan seperti GKI di mana saya menjadi bagiannya, seringkali pemahaman mengenai gereja sebagai persekutuan orang percaya ini memudar. Saya pernah bertemu dengan beberapa orang anggota dan pengurus dari sebuah pos jemaat atau bakal jemaat⁷ yang terus menerus meminta dan berharap, bahkan mulai merasa frustrasi, agar status pos/bakal jemaat itu berubah dan dilembagakan menjadi sebuah jemaat dewasa. Tanpa menyederhanakan masalah relasi yang dapat terjadi antara jemaat induk dan pos/bakal jemaat tersebut, saya agak kuatir melihat sikap dari beberapa orang ini. Kekuatiran saya adalah jika anggota-anggota jemaat ini memahami bahwa eksistensi mereka sebagai gereja hanya bisa didapatkan ketika mereka secara organisasi dan kelembagaan didewasakan menjadi jemaat dewasa. Mereka lupa bahwa sekalipun mereka adalah pos/bakal jemaat tetapi mereka secara eklesiologis adalah sebuah persekutuan jemaat, dan itu berarti mereka adalah gereja. Dan sebagai gereja mereka seharusnya dapat berkarya menghasilkan pelayanan yang nyata di tengah konteksnya tanpa dipengaruhi oleh status apapun secara organisasional. Jangan-jangan sikap frustrasi mereka ini justru menghalangi mereka untuk memberikan pelayanan dan karya yang maksimal, dan ini menunjukkan persoalan luntarnya gambar diri gereja sebagai sebuah persekutuan, dikalahkan oleh gambar gereja sebagai insititusi atau lembaga. Menurut saya, kondisi ini dapat disebabkan oleh konsep pemberdayaan yang selama ini lebih merupakan pemberdayaan institusi ketimbang pemberdayaan untuk jemaat. Dan persoalan lebih lanjut adalah wujud pemberdayaan seperti ini biasanya hanya terarah pada kelompok-kelompok aktivis gereja dan persoalan kelembagaan, bukan pada makna bersekutu serta menjadi anggota gereja.

Lebih jauh saya hendak memperlihatkan secara singkat hasil penelitian empiris yang sudah dilakukan oleh van Kooij dkk. (2007: 69-70) mengenai gereja-gereja protestan di Indonesia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ternyata ada kebutuhan dan harapan yang amat besar dari para responden, yang adalah anggota-anggota jemaat, agar pemimpin gereja membimbing anggota jemaat untuk mengenali bakat yang ada; selain itu gereja diharapkan mempersiapkan pemimpin-pemimpin baru. Hasil penelitian itu juga melaporkan situasi yang dianggap stagnan dalam kehidupan gereja yaitu kesempatan pada anggota jemaat untuk melayani sesuai bakat mereka. Tentu diperlukan data dan penelitian lain untuk memeriksa hal ini lebih jauh. Tetapi secara sederhana dan umum melalui penelitian ini kita dapat berasumsi bahwa salah satu persoalan gereja protestan di Indonesia justru adalah kesediaan untuk melibatkan sebanyak mungkin anggota jemaat

dalam kehidupan bergereja. Dalam keseharian di jemaat, tidak sedikit anggota jemaat yang memahami gambar gereja sebagai gereja institusional dan identik dengan para pejabat serta birokrat gereja. Contoh yang lain adalah, anggota jemaat yang lebih senang melihat bahwa pendeta dan atau penatua (pejabat gerejawi) sebagai pelaku tunggal dari seluruh tanggung jawab tugas gereja. Di sisi yang lain, para pendeta, penatua, pejabat gerejawi atau para aktivis gereja tertentu juga ada yang menikmati kondisi seperti ini dengan memelihara pola kepemimpinan dan sistem gereja yang sentralistis-hirarkis, pendeta-sentris, atau situasi yang tidak mendukung iklim positif serta terbuka bagi semua anggota. Van Kooij dkk. (2007: 68,73) menunjukkan beberapa hal yang mendukung pendapat di atas. Ketika penelitian diarahkan untuk mendapatkan potret mengenai faktor iklim dan tujuan dalam kehidupan bergereja, ada harapan yang tinggi dari para responden pada persoalan informasi mengenai pelayanan gereja kepada seluruh anggota dan juga keterlibatan sebanyak mungkin anggota dalam kegiatan dan keputusan gerejawi. Hal yang senada saya dengar dari para mahasiswa di Program Master of Ministry Fakultas Theologia UKDW (yang berasal dari gereja protestan), ketika mereka melaporkan pengamatan empiris mereka bahwa banyak dari anggota jemaat yang tidak merasa cukup terlibat atau tahu mengenai visi dan strategi gereja tempat mereka melayani. Data ini dapat kita artikan bahwa persoalan akses dan relasi anggota jemaat terhadap gerejanya sendiri ternyata terbatas. Jika kita menggunakan pemahaman hidup menggereja dari bawah sebagai pendekatan, maka pertanyaan utama yang dapat kita ajukan adalah, sampai sejauh mana sebenarnya peran anggota jemaat dipahami dan ditempatkan dalam praksis gereja protestan saat ini? Seperti yang telah kita bicarakan sebelumnya, pertanyaan ini menjadi penting dan relevan untuk melihat persoalan pemberdayaan jemaat. Jangan-jangan gereja sebenarnya enggan untuk membangun eklesiologi hidup menggereja dari bawah, dan konsekuensinya kemudian ada keengganan juga untuk melakukan pemberdayaan pada (semua) anggota jemaat. Gereja mungkin lebih senang menampilkan gambar diri yang lain, misalnya gereja institusi, yang ciri-cirinya adalah birokratis, hirarkis, kepemimpinan terpusat, otoritas terbatas pada elit, dan subordinasi anggota. Dengan demikian, pemberdayaan juga bersifat sangat terbatas untuk kelompok tertentu (bdk. Dulles 1974).

Menurut hemat saya jika kita hendak berbicara mengenai pemberdayaan jemaat, perlu juga kita secara serius memikirkan eklesiologi yang berkembang dalam praksis kita sehari-hari. Bagaimana gambar gereja yang dibangun oleh kita dan para pejabat gerejawi. Tentu saya setuju, bahwa masih diperlukan variabel-variabel lainnya untuk melanjutkan hal semacam ini dalam sebuah penelitian yang lebih serius, seperti variabel budaya, sejarah, konteks jemaat dsb. Tetapi hal utama yang hendak saya katakan di sini adalah, pemberdayaan perlu ditempatkan sebagai sebuah

konsekuensi logis ketika gereja memahamai persekutuan dan integritasnya secara mendasar terletak pada anggota jemaat, bukan pada kelompok atau elit tertentu. Tugas gereja berjalan, justru ketika seluruh anggota jemaat itu memiliki kesempatan dan semangat yang kuat untuk mewujudkan, apa yang disebut oleh Pieris, sebagai gerakan Kristus, atau yang oleh para teolog Pembangunan Jemaat disebut sebagai gereja yang vital (Hendriks 2002, Van Kessel 1997). Jika integritas dan pemahaman persekutuan gereja berangkat dan bergantung pada anggota jemaat, maka tentu pemberdayaan pada seluruh anggota jemaat adalah hal yang tidak mungkin akan diabaikan.

3. *Strategic trust dan moral trust*

Untuk mencapai tujuan bersama dan membangun komunitas yang berkomitmen memberdayakan anggota jemaat (termasuk membangun eklesiologi ‘hidup menggereja dari bawah’ dan gambar diri yang melibatkan sebanyak mungkin anggota jemaat), gereja dan juga komunitas/organisasi lainnya membutuhkan suatu pengikat. Jika kita menggunakan pendekatan sosiologis, salah satu unsur penting yang dapat menjawab kebutuhan ini adalah konsep ‘percaya’ (*trust*)⁸ kepada orang lain (Uslaner 2002; Seligman 1998; Misztal 1996). Tanpa trust atau konsep percaya, alih-alih terjadi pemberdayaan pada setiap orang, yang mungkin terjadi adalah setiap orang akan berjalan sendiri-sendiri tanpa bersedia untuk saling terikat, atau bersikap saling mengabaikan dan tidak peduli, mementingkan satu kelompok tertentu dan meninggalkan kelompok yang lain, bahkan mungkin lebih buruk lagi mereka akan terlibat dalam konflik. Setiap komunitas atau organisasi membutuhkan trust agar dapat mempertahankan dan menggerakkan anggota-anggotanya.

Berdasarkan literatur ternyata, konsep mengenai trust (percaya) itu sendiri ternyata amat beragam. Dari sekian banyak teori dan wacana mengenai trust, Eric Uslaner (2002) memperlihatkan distingsi yang menarik. Saya hendak memperlihatkan dua distingsi besar mengenai trust menurut Uslaner ini (2002:14-26). *Pertama* adalah strategic trust. Dalam model ini, trust dikaitkan dengan kepentingan dan harapan tertentu. Seseorang dapat percaya (trust) pada orang lain atau dipercaya (*trustworthy*) oleh orang lain ketika seseorang tersebut dapat memenuhi apa yang diharapkan darinya. Di sini persoalan relasi peran (*role*) dan harapan orang atas peran yang dimainkan (*role expectation*) menjadi amat penting. Karena itu strategic trust juga biasanya baru dapat tumbuh dengan baik ketika ada bukti dan pengalaman bersama yang cukup. Sebagai contoh dalam sebuah sekolah atau kantor, trust (rasa percaya) di antara para staf atau anggota-anggotanya dapat tumbuh dengan baik, ketika mereka semua melakukan fungsi dan peran yang diharapkan secara baik. Bersamaan dengan bukti dan pengalaman bekerja bersama-sama itu maka

trust dapat tumbuh menjadi semakin kuat (atau sebaliknya semakin lemah karena terbukti beberapa orang tidak dapat memenuhi harapan dan menjadi tidak dapat dipercaya). Faktor-faktor seperti kemampuan, keterampilan, tanggungjawab, ikatan kontrak, kesamaan sikap, tujuan, dsb. menjadi hal yang amat mempengaruhi sebuah strategic trust. Asumsi saya kita cukup *familiar* dengan model strategic trust ini.

Kedua adalah moral trust yang berbeda dengan strategic trust. Dalam moral trust, persoalan bukti dan pengalaman sama sekali bukan hal yang utama. Moral trust mengandaikan bahwa kepercayaan pada orang lain itu dapat tumbuh ketika kita justru menjadikannya sebagai sebuah sikap moral dengan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan seperti kesetaraan, keadilan dan solidaritas. Sebuah moral trust dengan prinsip-prinsip seperti ini melampaui batasan bukti dan pengalaman, karena trust bukan semata persoalan kepentingan atau harapan, tetapi sebagai suatu nilai dan pandangan dalam kehidupan bersama dengan orang lain (dalam suatu komunitas). Orang lain tidak dinilai dan dipercaya dari apa yang dapat ia lakukan kepada saya, tetapi karena memang ia seharusnya dipercaya sebagai manusia, terlepas apakah orang lain itu memberikan respon yang positif atau sebaliknya. Relasi saya dengan orang lain dimengerti sebagai relasi dalam sebuah komunitas dengan dasar nilai moral tentang kemanusiaan. Semakin dalam seseorang mengaplikasikan moral trust dalam hidupnya maka berarti semakin luas pemahamannya mengenai komunitas di mana ia hidup. Moral trust inilah yang memungkinkan membangun rasa percaya secara terbuka dalam komunitas modern yang biasanya diwarnai oleh kepelbagaian yang besar, dan dapat menjadi dasar yang kuat untuk mengatasi perbedaan-perbedaan harapan (bdk. Seligman 1998: 293).

Pada bagian awal saya telah berbicara mengenai hidup menggereja dari bawah. Dan sikap serta kondisi gereja yang seperti ini dengan sendirinya akan mendorong program-program pemberdayaan jemaat, karena hal itu akan menjadi kebutuhan. Nah, sekarang kita melihat persoalan trust sebagai dasar dan unsur relevan dalam kehidupan bersama yang tidak dapat diabaikan. Tanpa rasa percaya kepada anggota jemaat, entah itu dari pejabat gerejawi atau suatu kelompok dalam gereja kepada anggota-anggota jemaat, dan dari setiap anggota jemaat kepada anggota jemaat lainnya, maka hidup bergereja dalam arti hidup bersama sebagai sebuah persekutuan bersama akan sulit terwujud. Hal ini juga berarti akan ada kesulitan untuk membangun sikap hidup menggereja dari bawah dan menjalankan program-program pemberdayaan kepada seluruh anggota jemaat. Sikap hidup menggereja dari bawah mengandaikan bahwa setiap anggota jemaat, siapapun mereka, dengan segala kondisi dan keberadaan mereka, adalah setara. Karena itu setiap anggota jemaat harus dipercaya dan kemudian diberdayakan agar memiliki kemampuan untuk membangun refleksi teologis dan sikap iman sebagai gereja.

Sampai di sini, pertanyaan yang muncul adalah apa relevansi dari masing-masing konsep trust (percaya) dengan persoalan pemberdayaan jemaat? Mari kita mulai dengan konsep strategic trust. Jika suatu jemaat atau gereja biasa mengembangkan konsep strategic trust dalam interaksi dan relasinya maka program pemberdayaan yang amat diperlukan adalah pelatihan kemampuan tertentu, pembentukan tanggungjawab, penyeragaman visi serta tujuan kepada anggota-anggota jemaat. Gereja harus memastikan bahwa anggota jemaat terjamin dapat melakukan apa yang diharapkan oleh institusi, otoritas gereja, dan anggota jemaat lainnya. Semakin setiap anggota jemaat dapat dipersiapkan dengan kemampuan dan tanggungjawab seperti yang diharapkan, maka semakin mereka dapat dipercaya, dan berarti semakin besar pula kesempatan untuk mereka terlibat dalam gereja. Dengan demikian, kesempatan dan partisipasi anggota jemaat bergantung pada seberapa besar mereka dapat dipercaya sesuai dengan harapan gereja.

Konsep strategic trust ini mendorong pemberdayaan anggota-anggota jemaat dengan memperhatikan keterampilan dan kemampuan baik teknis maupun non-teknis. Saya rasa hal ini amat penting. Jika kita membayangkan bahwa dalam hidup menggereja dari bawah adalah terlibatnya anggota-anggota jemaat dalam kelompok-kelompok di aras lokal untuk menjalankan tugas serta fungsi gereja, maka anggota-anggota jemaat tersebut harus terpercaya dan itu berarti mereka juga harus memiliki keterampilan, kemampuan, termasuk hal yang mendasar seperti visi dan pemahaman tentang menjadi gereja secara baik. Tetapi di sini juga kita melihat ada dua persoalan yang perlu kita sadari. Pertama, hidup menggereja dari bawah tidak menempatkan otoritas gereja secara berlebihan hanya pada para pejabat gerejawi atau kelompok tertentu. Dengan demikian kita juga harus ingat bahwa percaya (trust) dan terpercaya (trustworthy) yang dibutuhkan dalam gereja bukan semata-mata terpenuhinya harapan atau kemampuan berdasarkan ukuran satu atau beberapa kelompok tertentu. Kedua, penekanan yang berlebihan pada persoalan harapan dan kemampuan saja bisa jadi justru memang membatasi pemberdayaan jemaat hanya pada orang-orang atau kelompok tertentu berdasarkan kepentingan-kepentingan tertentu juga. Karena persoalan siapa yang akan dipersiapkan, materi apa yang akan diberikan, dan harapan apa yang akan dicapai, amat bergantung pada siapa yang mempersiapkan, dan ini bisa jadi kembali kepada kepentingan-kepentingan pejabat, pimpinan, aktivis atau program gereja yang sudah ada. Bagi saya hal ini dapat mempengaruhi substansi dan keluasan konsep pemberdayaan jemaat dalam semangat hidup menggereja dari bawah. Saya melihat bahwa harapan tentang peran (*role expectation*) dalam kehidupan bergereja harus berdasarkan pada konsep mengenai gereja itu sendiri, yaitu sebagai persekutuan Tubuh Kristus dan semangat untuk mewujudkan gerakan Kristus dalam konteks

kehidupan yang konkret. Ini berarti kita sebenarnya sedang berbicara mengenai pemahaman dan nilai yang hidup serta mengikat dalam komunitas atau persekutuan yang bernama gereja.

Berdasarkan diskusi di atas, bagi saya trust yang seharusnya dibangun oleh gereja, terutama dalam hidup menggereja dari bawah, semestinya melampaui hal-hal yang bersifat strategis. Gereja tidak sekedar mengandalkan harapan dan kemampuan tertentu berdasarkan manusia, kelompok atau program institusi tertentu saja (sekalipun semua ini juga memiliki arti penting). Semangat hidup menggereja dari bawah berangkat dari nilai yang mendasari setiap anggota jemaat untuk terikat satu dengan yang lain sebagai sebuah persekutuan Tubuh Kristus dan bersedia memperjuangkan semangat serta gerakan Kristus dalam hidup pelayanan mereka. Pengertian mengenai nilai yang mendasari ikatan dan tindakan seperti ini cocok dengan konsep moral trust. Dan dengan demikian konsekuensi menghidupkan konsep moral trust dalam persekutuan gereja adalah pemberdayaan jemaat akan dilihat pertama-tama bukan sebagai penunjang untuk kemampuan tertentu, apalagi yang hanya terbatas pada orang atau kelompok tertentu saja. Pemberdayaan jemaat dipahami sebagai sebuah penyadaran dan pembangunan nilai serta semangat Kristus pada setiap anggota jemaat tanpa terkecuali. Pemberdayaan seperti ini akan berdampak pada pembentukan gambar diri (konsepsi identitas) warga gereja dan pemberian kesempatan yang konkret untuk berkreasi dalam kehidupan bergereja.

4. Kesimpulan

Berdasarkan diskusi mengenai hidup menggereja dari bawah dan persoalan trust (percaya) ini, ada beberapa hal yang dapat kita ingat sebagai kesimpulan. *Pertama*, pemberdayaan jemaat adalah sebuah konsekuensi dari sebuah pemahaman eklesiologis. Pemahaman tertentu mengenai gereja akan menghasilkan gaya pemberdayaan tertentu pula. Karena itu menjadi penting untuk memperhatikan bagaimana suatu gereja membangun pemahaman mengenai dirinya sendiri untuk membuat evaluasi dan perencanaan atas pemberdayaan jemaat. *Kedua*, eklesiologi hidup menggereja dari bawah selain memiliki relevansi teologis yang kuat, juga menjadi sebuah tantangan untuk konsep pemberdayaan jemaat. Semangat hidup menggereja dari bawah menuntut pemberdayaan yang terarah pada penguatan kemampuan berteologi, kemandirian dalam bersekutu dan kreativitas serta kesempatan dalam mengembangkan pelayanan bagi seluruh anggota jemaat, termasuk mereka yang justru terpinggirkan. Sebuah pemberdayaan bukan lagi bertolak dari siapa yang perlu diberdayakan, tetapi justru pada persoalan kontekstual apa yang harus diperhatikan dalam kehidupan anggota jemaat dan masyarakat, sehingga arah pemberdayaan menjadi jelas. *Ketiga*, pemeliharaan komunitas gereja dari bawah, yang mengandalkan gerakan setiap individu

dan kelompok terkecil dalam gereja, yang pelayanannya terbuka serta menjawab pergumulan-pergumulan kontekstual masyarakat, mengandaikan pemahaman yang merata pada setiap anggota jemaat mengenai semangat serta gerakan Kristus. Pemahaman seperti ini sesuai dengan konsep moral trust, di mana setiap anggota dalam sebuah komunitas saling percaya dan mengikatkan diri berdasarkan nilai dan prinsip-prinsip kemanusiaan yang mereka pegang bersama. Pemberdayaan jemaat dalam konsep seperti ini adalah soal memampukan semua anggota jemaat untuk memahami nilai dan semangat Kristus sebagai hal yang paling mendasar dalam kehidupan bergereja dan pada akhirnya memberikan kesempatan kepada seluruh anggota jemaat untuk berkarya dalam pelayanan yang konkret.

Tentu karangan ini masih banyak meninggalkan pertanyaan dan persoalan lain yang belum terjawab. Saya juga tentu sadar bahwa pemberdayaan juga menyangkut soal-soal teknis yang perlu dikonkretkan agar program pemberdayaan itu sendiri menjadi efektif. Tetapi karangan ini memang dimaksudkan sebagai sebuah tulisan dan pengamatan awal untuk melihat pemberdayaan jemaat sebagai persoalan teologi praktis. Karena itu saya sendiri berharap bahwa evaluasi dan pembicaraan gereja mengenai pemberdayaan dapat melampaui sekedar urusan membuat program pemberdayaan bagi para aktivis yang pada akhirnya hanya berbicara mengenai hal-hal keterampilan bagi orang tertentu saja dan kemudian melupakan keberadaan keseluruhan anggota jemaat sebagai gereja itu sendiri.

Daftar rujukan

- Banawiratma, J.B.
1997, "Hidup Menggereja Baru yang Dapat Dipertanggungjawabkan", dalam *Penuntun*, vol. 3, no. 11, GKI SW Jabar, Jakarta, pp. 281-288
- Boff, Leonardo; Boff, Clodovis
2003, "The Basic Question: How to be Christians in a World of Destitution", *Social Policy*, summer 2003, vol. 33 issue 4, pp 28-32
- Boff, Leonardo
2000 (1988), *Holy Trinity, Perfect Community*, Orbis Books, Maryknoll, New York
- Cobb Jr, John B.
1997, *Reclaiming the Church*, Westminster John Knox Press, Louisville, Kentucky
- Doyle, Dennis M.
1992, "Communion Ecclesiology and the Silencing of Boff", in *America*, vol 167 no. 2, pp. 139-143
- Dulles, Avery
1974, *Models of the Church*, Doubleday & Company, Inc., Garden city, New York
- Hendriks, Jan
2002, *Jemaat Vital & Menarik*, Kanisius, Yogyakarta
- Kärkkäinen, Veli-Matti
2002, *An Introduction to Ecclesiology*, IVP Academic, Illinois
- Pieris, Aloysius
1996, *Berteologi Dalam Konteks Asia*, Kanisius, Yogyakarta
- Mangunwijaya, Y.B.
1999, *Gereja Diaspora*, Kanisius, Yogyakarta
- Miztal, Barbara A.
1996, *Trust in Modern Societies*, Polity Press, Cambridge
- Nadeau, Kathy
1999, "Beyond the Dumping Ground": A Critique of the Basic Ecclesial Community Model as a Strategy for Development in an Urban Site", in *Human Organization*, vol 58 no. 2, pp. 153-160
- Schwarz, Christian A.
1996, *Pertumbuhan Gereja yang Alamiah*, Metanoia, Jakarta
- Seligman, Adam B.
1998, "Trust and Sociability: On the Limits of Confidence and Role Expectations", *American Journal of Economics and Sociology*, vol. 57, no. 4, pp. 391-404
- Singgih, Emanuel Gerrit
1999, "Gereja Diaspora dan Basic Human Communities", dalam Sudiarja, A. (ed.), *Tinjauan Kritis atas Gereja Diaspora Romo Mangunwijaya*, Kanisius, Yogyakarta, pp. 95-111
- Uslaner, Eric M.
2002, *The Moral Foundations of Trust*, Cambridge University Press, Cambridge
- Van Kessel, Rob
1997, *Enam Tempayan Air*, Kanisius, Yogyakarta
- Van Kooij, Rijnardus A.; Patnaningsih, Sri Agus; Tsalatsa, Yam'ah
2007, *Menguak Fakta, Menata Karya Nyata*, BPK Gunung Mulia, Jakarta
- Woodhead, Linda
2004, *An Introduction to Christianity*, Cambridge University Press, Cambridge
- Zizioulas, John D.
1988, "The Mystery of the Church in Orthodox Tradition", in *One in Christ*, 1988 – 4, pp. 294-303

¹ Draft awal karangan ini pernah disampaikan dalam Persidangan Majelis Klasis Solo Gereja Kristen Indonesia (GKI) SW Jawa Tengah tahun 2010.

² Pdt. Handi Hadiwitanto, MTh. adalah dosen di Fakultas Theologia UKDW Yogyakarta.

³ Saya membatasi pembicaraan di sini hanya mengenai pemberdayaan jemaat dalam konsep bergereja dan partisipasi anggota jemaat. Saya tidak berbicara mengenai pemberdayaan lain seperti pemberdayaan sosial-ekonomi anggota

jemaat atau pemberdayaan keterampilan tertentu, sekalipun tentu akan ada konsekuensi-konsekuensi yang mengarah pada pemberdayaan-pemberdayaan lain tersebut.

⁴ Praksis dipahami sebagai sebuah proses dialogis yang dinamis antara teori dan aksi yang dijalankan dalam keseharian. Dalam konteks gereja maka hal ini dapat dimengerti sebagai proses dialogis antara hal-hal yang normatif-teologis (termasuk apa yang dimengerti melalui interpretasi atas Alkitab dan tradisi gereja) dengan hal-hal praktis dalam kehidupan sehari-hari (pengalaman dan budaya).

⁵ Pemahaman ini berjalan seiring dengan konsep eklesiologi 'dari bawah' sebagai lawan dari eklesiologi 'dari atas'. Eklesiologi 'dari bawah' menunjukkan konsep eklesiologis yang berangkat dari pergumulan dan situasi konkret gereja dan atau komunitas lokal di tengah konteksnya, sedangkan eklesiologi 'dari atas' adalah eklesiologi umum yang biasanya lebih bersifat dogmatis-normatif dan merupakan hasil dari tradisi gereja serta teologi sistematis (lih. Kärkkäinen 2002:180-2).

⁶ Istilah komunitas basis di sini adalah terjemahan dari *basic christian community* atau *basic ecclesial community* (Pieris 1996; Nadeau 1999).

⁷ Dalam Tata Laksana (Tata Gereja GKI 2009) pasal 2:1, Pos Jemaat adalah wadah kegiatan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan jemaat di suatu wilayah tertentu yang diarahkan untuk menjadi Bakal Jemaat. Dalam pasal 3:1, Bakal jemaat adalah bagian dari Jemaat yang merupakan pengembangan dari Pos Jemaat yang diarahkan untuk menjadi Jemaat.

⁸ Untuk memudahkan penjelasan selanjutnya karena terkait teori tertentu, saya tetap akan menggunakan kata dalam bahasa Inggris '*trust*' untuk menjelaskan 'percaya' dalam karangan ini.